

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, *Pemilu dan Partai Politik Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2013.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Amzulian Rifai, *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya*, PT sofmedia, Jakarta, 2012.
- Asep Nana Mulyana dkk, *Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Modul Asas-Asas Hukum Pidana)*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2014.
- Bambang Sutiyono, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- C. S. T. Kansil dkk, *Tindak Pidana Dalam Perundang-Undangan Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- E. Saefulla Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana “Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya”*, LaksBang, Yogyakarta, 2011.
- Inu Kencana Syafii dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT Alumni, Bandung, 2004.
- Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009.
- Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung, 2013.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Pipit R. Kartawidjaja dan Mulyana W. Kusumah, *Sistem Pemilu dan Pemilihan Presiden*, KIIP Eropa, Jakarta
- Prayoga Bastari, *Pemilu Demokratis Di Indonesia dan Di Negara Maju*, CV Mughni Sejahtera, 2009.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 13.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Suharizal, *Pemilukada*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2007. Teguh

Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013. Titik

Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.

Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Viswanto dkk, *Mengenal Profesi Penegakan Hukum*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

### C. Jurnal

Dedi Irawan, *Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014*, Ejournal Ilmu Pemerintahan, 2015.

Dewi Permatasari Sulistyohningsih, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Ilmu Hukum, Juli-November 2015.

Imawan Sugiharto, *Rekontruksi Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresif*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 1, Januari-April 2016.

La Jamaa La Sudirman, *“Hibah dan Money Politic Dalam Pemilu dan Pilkada Perspektif Sosiologi dan Politik Hukum”*, Jurnal Fikratuna, Vol. 8 No. 2, 2016.

Rif'ah Roihanah, *“Penegakan Hukum Di Indonesia : Sebuah Harapan dan Kenyataan”*, Justitia Islamica, Vol. 12 No. 1, Jan-Juni 2015.

Sri Wahyu Ananingsih, *Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 1, Januari 2016.

Zulkarnain, *Kajian Penegakan Hukum Pasca Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Konstitusi, Vol. III No. 2, November 2010.

### D. Data Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Indra Irawan, KANIT TIPIKOR, tanggal 10 November 2017 di POLRES Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Subari Prima selaku Ba Sat Reskrim Unit III Tipikor di POLRES Bangka, tanggal 13 Maret 2018.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Yaumi Ikrom selaku Kasubag Hukum di BAWASLU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hari Rabu 7 Maret 2018.

**E. Data Elektronik**

Kejaksaan RI, [https://kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1), pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 14.20 WIB.

**F. Putusan**

Putusan Nomor 197/Pid.B/2012/PN.Sgt.

